

DAFTAR PUSTAKA

- Al-ghifari, D. A. 2020. *Analisis Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*. Pekanbaru: Skripsi Uin Suska Riau.
- Eka, P. T., Kapti. 2019. *Implementasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani*. Malang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hapsari, J., Purnaweni, H., Priyadi, B. P. 2019. Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang. Semarang: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1 No.1*.
- Hartanto, D., Hidayat, N. 2021. *Wilayah Birokrasi Bersih Melayani: Best Practice*. Medan: Buku Universitas Medan Area Press.
- Hartono, D. 2019. Kajian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Sumatera Utara: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7 (2), 71-87.
- Laoly, Y. H. 2018. *Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Hukum dan HAM RI*. Jakarta: Buku Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Martini, R. 2011. Sebuah Ide tentang Birokrasi Masa Depan. Semarang: *Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2, No. 1*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
- Risnawan, W. 2017. Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. Universitas Galuh: *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4, No. 1.*
- Sirin, A. 2021. Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Pekalongan: *Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan, Vol. 5, No. 2.*
- Subekti, N. 2020. *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020.* Bogor: Buku Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Suryantoro, B., Kusdyana, Y. 2020. Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Surabaya: *Jurnal Baruna Horizon, Vol. 3, No. 2.*
- Wilujeng, D. S., Pramudyastuti, O. L. 2020. Evaluasi Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Magelang: *Joernal Of Economic, Management, Accounting And Technology, Vol. 3, No.2.*
- Yuniningsih, T. 2019. *Kajian Birokrasi.* Semarang: Buku Departemen Administrasi Publik Press.
- Tren Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi 2017-2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021> Diakses pada Sabtu, 23 April 2022 Pukul 21.15
- Makna dan Tujuan Reformasi Birokrasi. menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan1 Diakses pada Sabtu, 30 April 2022 Pukul 21.10